

PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sulistyarini

Dosen FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak

e-mail: ssulistyarini@yahoo.com

Abstract: *The existence of a nation is determined by the character that is owned. Only Nations that have strong characters who are capable of making himself as a nation a dignified and respected by other peoples. development of the culture and character of a nation can only be done in a process of education that do not release students from social and cultural environment of the society and culture of the nation. The nation's social and cultural environment is the Pancasila. Culture and national character education should be based on the values of Pancasila. Citizenship education as a socio-cultural movements of the Citizenship Act as self-actualization citizens, either individually or in groups in accordance with the rights, obligations and social cultural context, through active participation in a smart and responsible. for PKn can actually contribute in the framework of the construction of the national character, the three things we need to be aware of, namely "curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment.*

Keywords: *Characters, Curriculum Content and Instructional Strategies, Civic Education, Classroom Learning Environment*

Abstrak: Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila. Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan berperan sebagai aktualisasi diri warganegara, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung. agar PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu "*curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment.*

Kata Kunci: *Karakter, Curriculum Content and Instructional Strategies, Civic Education Classroom, Learning Environment*

PENDAHULUAN

Kemajuan negara sangat ditentukan oleh kualitas bangsa. Oleh karena itu, para *founding fathers* menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Bahkan para *founding fathers* telah memberi arah dan landasan yang jelas bagi pembangunan negara-bangsa dan karakter yaitu Pancasila. Oleh karena itu,

Pancasilabukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan ideologi. Fungsi sebagai dasar negara memberi arah dan landasan dalam tata kehidupan bernegara, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Fungsi Pancasila sebagai ideologi memberi arah dan landasan bagi pembangunan dan sekaligus memberi

gambaran tentang kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup memberi arah dan landasan bagi pembangunan karakter bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup membawa implikasi bahwa Pancasila juga sebagai jiwa dan sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Ini berarti moral dan karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua. Membangun peradaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah *condition sine qua non* bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan apabila individu-individu manusia Indonesia sebagai pendukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur. Pembangunan karakter dan jati diri bangsa merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan Pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral dan norma. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu. Namun demikian, dikarenakan manusia hidup dalam lingkungan sosial budaya tertentu, maka pengembangan karakter hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan

yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah **Pancasila**. Jadi Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Sayangnya, kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia oleh banyak pihak diakui telah menunjukkan adanya degradasi atau demoralisasi dalam pembentukan karakter dan kepribadian Pancasila tersebut. Degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai inti atau *core values* dari pembentukan karakter bangsa tersebut terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia (2010:16-19) dewasa ini ada enam permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa, yaitu :

- a. Disorientasi dan belum Dihayatinnya Nilai-nilai Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi Bangsa
- b. Keterbatasan Perangkat Kebijakan Terpadu dalam Mewujudkan Nilai-nilai Esensi Pancasila
- c. Bergesernya Nilai-nilai Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- d. Memudarnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa
- e. Ancaman Disintegrasi Bangsa
- f. Melemahnya Kemandirian Bangsa

Adanya enam permasalahan tersebut telah muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut muncul dalam berbagai kasus, seperti : perkelahian pelajar dan mahasiswa (tawuran); cukup banyak orangtua, guru dan para pemimpin yang melakukan tindakan tidak terpuji dan menghilangkan rasa hormat anak pada mereka, atau anak yang tega membunuh orangtua karena kemauannya tidak dituruti. Maraknya kelompok anak-anak muda yang melakukan kriminal, contoh geng motor,

memperkosakan bersama-sama, dan sebagainya. Meningkatnya rasa bermusuhan antaretnis, antaragama. Cara berkomunikasi yang menebarkan rasa bermusuhan, konflik dan saling memojokkan, sangat sering kita dengar di lingkungan atau melalui media. Ajaran para tetua dulu yang santun sudah lama ditinggalkan. Perilaku merusak diri dengan narkoba, minuman keras dan perilaku seks bebas terus saja bertambah jumlahnya. Etos kerja yang rendah dan bermimpi punya uang banyak, membuat penipuan, pencurian, dan korupsi merajalela. Pemberitaan yang riuh dan simpang siur oleh media-media yang komersial membuat warga semakin kehilangan pedoman moral. Permasalahan yang kompleks itu tentunya memerlukan jalan keluar dan tindakan yang nyata.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Karakter

Pendidikan untuk membangun karakter bukan barang baru untuk Indonesia. Pesan yang sangat jelas mengenai pentingnya membentuk (membangun) karakter sudah disampaikan oleh W.R. Supratman dalam lagu Indonesia Raya, ‘...*Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya*’. W.R. Supratman menempatkan pembangunan “jiwa”, sebelum pembangunan badan”, bukan sebaliknya. Pembangunan karakter adalah pembangunan “jiwa” bangsa. Pendidikan karakter juga sebagai perwujudan amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pendidikan karakter juga sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 yang dituangkan dalam RAN (Rencana Aksi Nasional) Pendidikan Karakter (2010), ditegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik baik itu tingkat dasar, menengah maupun tingkat lanjut dan tinggi secara optimal. Dengan kata lain pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuannya, nilai dan sikapnya serta ketrampilannya. “...pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita..” (*Ki Hajar Dewantoro*).

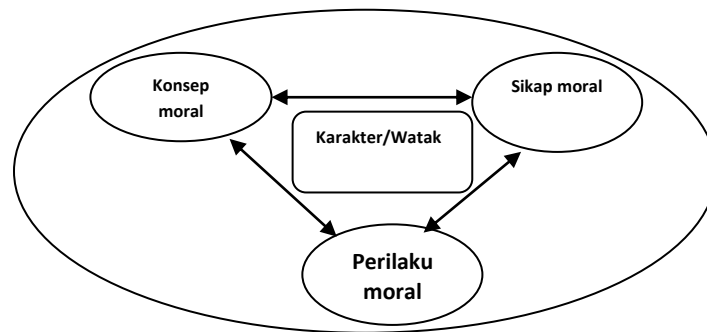
Dalam kamus *Webster New World Dictionary* (1991) yang dimaksud dengan karakter adalah ‘*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*. Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata ‘watak’ yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Istilah *character* (karakter) memiliki makna substantive dan proses psikologis yang sangat mendasar. Lickona (1992:50) merujuk pada konsep *good character* yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai “...*the life of right conduct-right conduct in relation to other persons and in relation to oneself*”.

Dengan kata lain karakter dapat dimaknai sebagai kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan, yakni berperilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan YME, manusia dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri. Peterson dan Seligman, dalam buku *'Character Strength and Virtue* (Raka, 2007) mengaitkan secara langsung *'characterstrength'* dengan kebajikan.

Karakter menurut Alwisol (2006) diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku (Wynne, 1991). Oleh sebab itu, orang yang berperilaku tidak

jujur, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong, dikatakan orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral.

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feelling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini.



Gambar 1:
Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter yang baik menurut Lickona

Ratna Megawangi (2004) sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu :

1. *Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya*
2. *Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan Kemandirian*
3. *Kejujuran*
4. *Hormat dan Santun*

5. *Kasih Sayang, Kepedulian, dan Kerjasama*
6. *Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras, dan Pantang Menyerah*
7. *Keadilan dan Kepemimpinan*
8. *Baik dan Rendah Hati*
9. *Toleransi, Cinta Damai, dan Persatuan*

Dengan demikian pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli

dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil.

B. Pancasila Sebagai Karakter Bangsa Indonesia

Maswardi Rauf (2008: 88) menegaskan, karakter bangsa adalah “sifat yang melekat pada bangsa secara keseluruhan yang terlihat dari pola pikir dan tingkah laku yaitu kultur/budaya atau nilai yang dianut oleh warga masyarakat untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku”. Berdasarkan pendapat di atas karakter bangsa dapat terbangun melalui budaya yang ada di masyarakat. Sedangkan budaya-budaya tersebut di kristalisasikan dan melahirkan suatu pandangan hidup bersama yang kita kenal dengan Pancasila. Sehingga keberadaan nilai-nilai Pancasila perlu terus dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai dengan cita-cita bangsa. Kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambkannya, serta mampu untuk mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian sumber karakter adalah *belief system* yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses. Bagi bangsa Indonesia *belief system* ini tiada lain adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam membentuk karakternya.

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010:7) menyebutkan bahwa karakter bangsa merupakan “kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil

olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang”. Sehingga individu yang telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut :

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik;
2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi iptek dan reflektif;
3. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain: bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih;
4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain, kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 22).

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, karakter bangsa dimaknai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara pikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila

C. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembangunan Karakter Bangsa

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yakni *civic education* dan *citizenship education*.

Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*”.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education* is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2) atau PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Dasim Budimansyah dalam pidato pengukuhan (2008) menyatakan bahwa, “pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap perkembangan karakteristik yang menandai sebagai warga Negara”. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwasannya ada tiga peran PKn, *pertama*, berdasarkan pendekatan *psyco-paedagogical development* yaitu PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/Perguruan Tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan

anak dan pemuda sesuai potensinya agar menjadi warga Negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*). *Kedua*, berdasarkan pendekatan *socio-cultural development* yaitu Pkn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai aktualisasi diri warganegara, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks social budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. *Ketiga*, berdasarkan pendekatan *socio-political intervention* yaitu PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara Negara, anggota dan pimpinan organisasi social dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*).

Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* atau *civic education* dalam arti luas oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002). Secara terminologis, PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2011).

Dilihat secara yuridis, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat PKn yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya bagaimana strategi PKn untuk pembangunan karakter bangsa? Mengutip pendapat Winataputra (2001), agar

PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu *“curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment. Pertama,* dilihat dari content kurikulum, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan ialah: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia. Substansi PKn tersebut menjadi dasar dalam pembangunan karakter warga negara yang pada gilirannya dapat terakumulasi menjadi karakter bangsa. Tugas para guru/dosen mengembangkan materi-materi tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Kedua, kelas PKn seyogyanya dilihat dan diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi. Menurut Winataputra (2001) *“...laboratory for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teachers should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned”*. Profil konseptual kelas PKn yang digagaskan di atas, harus dikembangkan untuk menggantikan kelas PKn saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Untuk itu maka proses pembelajaran PKn perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat *memberdayakan siswa/mahasiswa*. Dengan demikian kelas PKn akan berubah dari yang selama ini bersifat *“dominatif”* menjadi *“integratif”*. Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau *“critical thinking-*

oriented and problem solving-oriented modes”.

Ketiga, pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi *“spiral global classroom”* (Cogan, 1999:7). Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoks antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Perlu disadari bahwa pembangunan karakter merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari unsur sekolah (lembaga pendidikan), orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama antara sekolah (lembaga pendidikan) dengan orang tua dan sekolah (lembaga pendidikan) dengan lingkungan masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab kewenangan untuk melakukan pembinaan karakter, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semua komponen merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karakter.

PENUTUP

Karakter bangsa dimaknai sebagai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara pikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup membawa implikasi bahwa Pancasila juga sebagai jiwa dan sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Pembangunan karakter adalah pembangunan ‘jiwa’ bangsa. pendidikan Karakter juga sebagai perwujudan amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945

Secara yuridis, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat PKn yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki

rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Agar PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu “*curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment.*”

DAFTAR PUSTAKA

Alwisol. (2006). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM.

Azra, A. (2006). “*Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*”. Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.

Cholisin. (2011). *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn*. Makalah disampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta, 18 januari 2011

Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CICODE

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Doni Koesoema A (2009). *Pendidik Karakter*. Jakarta : Kompas Gramedia.

Gede Raka.(2007). *Pendidikan Membangun karakter*.<http://www.jatidiribangsa.or.id>

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

_____.(2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta:Kementerian Pendidikan nasional Badan Penelitian dan Pendidikan Pengembangan Pusat Kurikulum.

Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.

Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character. How our scholl can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books

Ratna Megawangi.(2004). *Pendidikan Karakter*.Jakarta : IHF

_____ (2007). *Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis karakter*.
<http://keyanaku.blogspot.com/2007/09/membangun-sdm-Indonesia.Html>.

Rauf, M dkk. (2008). *Refleksi Karkater Bangsa*.Jakarta : UI.

Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter. 2010

Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.

Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan.